

## Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim

Endang Srie Narullita<sup>1</sup>

Universitas Dr. Soetomo<sup>1</sup>

esnarullita@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRACT

To keep up with technological developments, the National Police has issued a new system for enforcing traffic rules called ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETLE is an information technology-based traffic law enforcement system that uses electronic devices in the form of cameras that can detect various types of traffic violations and provide motor vehicle data automatically (*automatic number plate recognition*). ETLE camera footage can be used as evidence in cases of traffic violations. The use of ETLE is also a form of Polri's contribution in realizing East Java Province as a smart city and is in line with bureaucratic reform. Another benefit is increasing the culture of public order in traffic, which is a deterrent effect of the ETLE system. The main problem that will be discussed in writing this thesis is How effective is the enforcement of traffic violations using the *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) system at the East Java Regional Police? What are the obstacles in implementing the *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) system against traffic violators at the East Java Regional Police? and What is the role of the East Java Regional Police Traffic Directorate in providing solutions in implementing traffic violation law enforcement with *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)? This research uses a type of Empirical Legal Research, namely a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. The East Java Police Traffic Directorate plays a role as an innovator in developing a law enforcement system for traffic violations using an information technology approach. ETLE can be said to be a method of prosecuting violations that has a positive impact on reducing the number of traffic violations.

**Keywords:** System, ETLE, *Electronic Traffic Law Enforcement*,

### ABSTRAK

Untuk mengikuti perkembangan teknologi, Polri mengeluarkan sistem baru dalam penegakan aturan lalu lintas yang disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Penggunaan ETLE juga merupakan bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai *smart city* dan sejalan dengan reformasi birokrasi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan budaya ketertiban umum dalam berlalu lintas, yang merupakan efek jera dari sistem ETLE. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda Jatim? Apa saja kendala dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Polda Jatim? dan Bagaimana Peran Ditlantas Polda Jatim memberikan

solusi dalam pelaksanaan penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)? Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata melalui observasi langsung. Ditlintas Polda Jawa Timur berperan sebagai inovator dalam pengembangan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi. ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas.

**Kata kunci:** Sistem, ETLE, *Electronic Traffic Law Enforcement*.

## PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem ETLE yang bertujuan untuk memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem ini menggunakan teknologi canggih seperti CCTV dan ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) untuk merekam dan mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pengemudi yang sering kali membuka peluang untuk korupsi (Ambar Suci Wulandari, 2020: 2-10). Peningkatan dalam pengawasan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun, sebagaimana data dari Polda Jatim menunjukkan penurunan signifikan dalam pelanggaran dari tahun 2018 hingga 2021 (Sumber Langsung Dari Penulis Sendiri Yang Bekerja Sebagai Anggota Polri di Polda Jatim).

Penerapan ETLE juga diatur oleh undang-undang, yaitu Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjamin prosedur penilangan yang adil dan transparan. Keberhasilan sistem ini tidak hanya dilihat dari penurunan angka pelanggaran, tetapi juga dari peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dengan sistem ETLE, pelanggar dikenai sanksi yang setara tanpa memandang status sosial, yang mana ini membantu dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan merata (Ambar Suci Wulandari, 2020: 1-10).

Keberhasilan ETLE di Jawa Timur menunjukkan pentingnya integrasi teknologi dalam penegakan hukum dan menawarkan model yang bisa diadopsi oleh wilayah lain untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Implementasi sistem ini adalah langkah maju yang signifikan dalam usaha pemerintah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan umum di jalan raya.

Penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) memberikan manfaat dari sisi penegakan hukum dan masyarakat, khususnya terkait transparansi, pemberdayaan, daya tanggap, dan keadilan. Jika pelanggaran tidak ditanggapi, petugas akan melanjutkan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sehingga peneliti tertarik dalam penelitian dengan judul "Penerapan Sistem

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran rambu rambu-rambu di Wilayah Hukum Polda Jatim”*

Dalam penelitian ini, beberapa masalah utama yang akan dibahas adalah meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran rambu-rambu melalui penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Polda Jatim, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem ETLE dalam menangani pelanggaran rambu-rambu, dan mengeksplorasi peran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim dalam memberikan solusi selama proses penegakan hukum untuk pelanggaran rambu-rambu menggunakan sistem ETLE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang dinamika operasional dan tantangan dalam implementasi ETLE, serta strategi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim dalam mengatasi masalah tersebut.

Metode penelitian dalam studi ini mengikuti prosedur ilmiah yang konsisten dengan metodologi penelitian sosiologis empiris/yuridis, yang melibatkan penerapan ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum di masyarakat melalui Studi Kasus Non-Yudisial tanpa keterlibatan pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Polda Jatim, menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Pendekatan penelitian hukum empiris ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengkaji hubungan antara hukum dan fenomena sosial, memfokuskan pada struktur interaksi dan konsekuensi sosial dari penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Sumber data diidentifikasi, disunting, dan disusun secara sistematis untuk dianalisis, dengan kesimpulan yang ditarik berdasarkan analisis kualitatif untuk menilai realitas penerapan ETLE dan efektivitasnya dalam konteks hukum dan sosial yang lebih luas.

## **METODE PENELITIAN**

Studi hukum sosiologis empiris/yuridis adalah penerapan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam jenis penelitian tersebut, kategori Studi Kasus Non-Yudisial dapat dimanfaatkan. Studi Kasus Non-Yudisial merupakan studi kasus hukum yang dilakukan tanpa sengketa dan tanpa keterlibatan pengadilan melalui proses investigasi lapangan.

Penelitian empiris merupakan suatu bentuk penelitian yang menghubungkan antara bidang hukum dengan perilaku manusia yang sebenarnya. Apabila pernyataan ringkas ini dapat dijadikan acuan, maka sejauh mana kajian hukum empiris berkaitan dengan tingkat hukum. Hal ini mengacu pada sejauh mana hukum benar-benar dapat diterapkan dalam konteks praktis kehidupan sosial. (Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 2004: 14). Peneliti langsung turun ke lapangan untuk bertemu dengan para informan dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penindakan Pelanggaran rambu rambu-rambu Menggunakan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Polda Jatim

Implementasi penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Polda Jatim, yang mencakup Provinsi Jawa Timur, didukung oleh perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ETLE dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pada rambu-rambu dan meminimalisir pelanggaran, dengan pemasangan kamera di lokasi strategis untuk mendeteksi pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Sistem ini secara resmi diterapkan di Surabaya pada 13 Januari 2020, dengan lebih dari seratus titik yang telah dipasang kamera ETLE untuk memantau dan merekam pelanggaran.

Sejak diperkenalkan, ETLE telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran di Jawa Timur. Pada tahun 2018 tercatat 1.236.721 pelanggaran yang meningkat di tahun 2019 menjadi 1.333.312 pelanggaran, namun setelah implementasi ETLE, terjadi penurunan drastis menjadi 795.189 pelanggaran di tahun 2020 dan turun lagi menjadi 218.139 di tahun 2021. Di tahun 2022 dan 2023, jumlah pelanggaran terus berkurang, menunjukkan efektivitas ETLE dalam mendorong disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Selain mengurangi jumlah pelanggaran, ETLE juga membantu meminimalisir kontak antara polisi dan masyarakat yang dapat menimbulkan protes jika terjadi kesalahpahaman dalam penilangan. Dengan ETLE, penegakan hukum menjadi lebih objektif dan transparan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan membantu membangun kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan keselamatan di jalan raya. Adapun Pelanggaran yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jatim penulis mengambil data sebagai perbandingan pada Tahun 2022 dan 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1. Anev Data Dakgar Lantas**

No	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	ETLE STATIS	59,924	39,748	-20,176	-33.67
2	ETLE MOBILE	34,757	50,881	16,124	46.39
3	KONVENSIONAL	311,487	122.424	-189.063	-60.70
4	TEGURAN	965,103	4,804,304	3,839,201	397.80
	JUMLAH	1,371,271	5,017,357	3,64,086	265.89

Sumber: Data Polda Jatim

**Tabel 2. Anev Data Dakgar Lantas Dari Jenis Pelanggaran**

No	JENIS PELANGGARAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	BATAS MUATAN	10,704	3,877	-6,827	-63,78
2	BATAS KECEPATAN	5,641	3,509	-2,132	-37.79
3	MARKA JALAN/RAMBU-2	119,412	64,955	-54,457	-45.60
4	SURAT-SURAT	79,349	29,825	-49,524	-62.41
5	SYARAT PERLENGKAPAN	39,885	19,226	-20.659	-51.80
6	TIDAK PAKAI HELM	101,731	68,132	-33.599	-33.03
7	TIDAK PAKAI SABUK KESELAMATAN	16.036	7,454	-8.582	-53.52
8	LAIN-LAIN	33.410	16,075	-17.335	-51.89
	JUMLAH	406,168	213,053	-193,115	-47.55

Sumber: Data Polda Jatim

**Tabel 3. Anev Data Dakgar Lantas Dari Jenis Kendaraan**

No	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	BUS	2,029	1,034	-995	-49.04
2	TRUCK	23,194	9,077	-14,117	-60.86
3	ANGKOT	368	149	-219	-59.51
4	PRIBADI	73,029	52,046	-20,983	-28.73
5	TAXI	24	8	-16	-66.67
6	RODA 2	290,223	142,976	-147,247	-50.74
7	PICK UP	17,301	7,763	-9,538	-55.13
	JUMLAH	406,168	213,053	-193,115	-47.55

Sumber: Data Polda Jatim

**Tabel 4. Anev Data Dakgar Lantas Dari Segi Profesi**

No	PROFESI	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	PNS	15,949	9,397	-6,552	-41.08
2	MAHASISWA	37.754	17,551	-20,203	-53.17
3	PENGEMUDI UMUM	27,205	14,167	-13,038	-53.17
4	PELAJAR	65,577	24,809	-40,766	-47.93
5	KARYAWAN SWASTA	224,050	126,642	-97,408	143.48
6	PEDAGANG	9,153	4,839	-4,314	-47.13

7	TANI/NELAYAN	6,664	3,154	-3,510	-52.67
8	BURUH	12,592	6,015	-6,577	-52.23
9	LAIN-LAIN	7,224	6,479	-745	-10.31
	JUMLAH	406,168	213,053	-193,115	-47.55

Sumber: Data Polda Jatim

**Tabel 5. Anev Data Dakgar Lantas Dari Segi Pendidikan Pelanggan**

No	PENDIDIKAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	SD	10,981	4,609	-6,372	-58,03
2	SLTP	45,618	20,979	-24,639	-54.01
3	SLTA	284,985	153,036	-131,949	-46.30
4	P.T	64.584	34.375	-30.209	-46.77
5	LAIN-LAIN	0	54	54	100.00
	JUMLAH	406,168	213,053	-193,115	-47.55

Sumber: Data Polda Jatim

**Tabel 6. Anev Data Dakgar Lantas Dari Segi Usia**

No	USIA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	01-15	21,635	7,417	-14,218	-65.72
2	16-21	83,390	39,679	-43,711	-52.42
3	22-30	138,631	67,143	-71,488	-51.57
4	31-40	94,225	50,180	-44,045	-46.74
5	41-50	48,875	33,862	-15,013	-30.72
6	51 KEATAS	19,412	14,772	-4,640	-23.90
	JUMLAH	406,168	213,053	-193,115	-47.55

Sumber: Data Polda Jatim

**Tabel 7. Anev Data Dakgar Lantas Dari Golongan Sim**

No	GOLONGAN SIM	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SELISIH ANGKA	TREND (%)
1	SIM A	52,678	36,986	-15,692	-29.79
2	SIM A UMUM	676	51	-625	-92.46
3	SIM B I	8.236	3,379	-4.857	-58.97
4	SIM B I UMUM	5,802	2,628	-3,174	-54.71
5	SIM B II	4,134	2,006	-2,128	-51.48
6	SIM B II UMUM	5,769	2,116	-3,653	-63.32
7	SIM C	152,105	72,379	-79,726	-52.42
8	TANPA SIM	176,768	213,053	-83,260	-47.10
	JUMLAH	406,168	213,053	-193,115	-47.53

Sumber: Data Polda Jatim

Selain itu di berbagai wilayah Jawa Timur terdapat daerah rawan kecelakaan rambu-rambu dan daerah rawan kemacetan yang sebagaimana penulis jelaskan di bawah ini dalam bentuk Tabel:

**Tabel 8. Daftar Daerah Rawan Kecelakaan**

No	POLRES	DAERAH RAWAN LAKA	DAERAH RAWAN KEMACETAN
1	Polrestabes Surabaya	Jl. A. Yani Surabaya Jl. Raya Mastrip Surabaya	Jl. Raya Wonokromo Jl. Dupak
2	Polresta Kota Malang	Jl. MT Haryono, Jl. Tumenggung Suryo, Jl. R.Panji	Jl.A. Yani , Jl. R Panji Suroso., Jl. MT. Haryono
3	Polres Probolinggo	Jl. Raya Thamrin Lawang KM 87-88 Sby-Mlg	Simpang 4 Kepuharjo Jl.Raya Pakisaji
4.	Polres Probolinggo	Jl. Raya KM 104 Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo Jl. Raya KM 129 Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo Jl. Raya KM 124 Desa Sumberlele Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo	Jl. Raya Malasan Kec. Tegalsiwalan Probolinggo
5	Polres Pasuruan	Jl. Raya Surabaya - Banyuwangi KM. 39.5 - 40 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan	Jl. Raya Surabaya - Banyuwangi Kel. Dermo Kec. Bangil Kab. Pasuruan
6	Polres Lumajang	Jl.Raya Lumajang-Probolinggo Plawangan,Grobogan Kec Kedung Jajang.	Pasar Wates Wetan Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang
7	Polres Bondowoso	Jl. Raya Bondowoso Jember Ds. Taman Kec. Grujungan (KM 201-202 SBY)	Jl. KH. Wahid Hasyim Bondowoso
8	Polres Situbondo	Jl. Raya Banyuputih	NIHIL
9	Polres Jember	Jl. Darmawangsa KM 10, Kec. Rambipuji, Kab. Jember	Simpang 4 Mangli, Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
10	Polresta Banyuwangi	Jl. S. parman kec kabat kab.Banyuwangi	Jl. Raya Pasar Genteng Kec. Genteng Kab.Banyuwangi
11	Polres Kediri Kota	Jalan Kaptén Tendean	Simpang 4 Mrican

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 1106 – 1118 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.2754

12	Polres Kediri	Jalan Raya Kediri Pare Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri	Jalan Umum Kediri Kertosono Lewat Mengkreng Kec. Purwoasri Kab. Kediri
13	Polres Blitar	Jl. Umum Desa Beru Kec. W lingi	Simpang 3 Pasar Kesamben
14	Polres Tulungagung	Jl. Raya Ngantru KM 12-12.5	Jl. Ir Soekarno Hatta (Jembatan Lembupeteng
15	Polres Nganjuk	Jl. Raya Ds. Pelem Kec. Kertosono	Simpang 4 Kertosono
16	Polres Tenggalek	Jalur Trenggalek- Tulungagung KM 139 (Jl. Nasional & Prov Menggunakan KM Surabaya), Desa Kendarejo Kec Durenan Kab. Trenggalek	Jl. Soekarno-Hatta (tepatnya berada di Simpang 3 Jarakan) masuk Ds. Karangsoke, Kec/Kab. Trenggalek
17	Polres Madiun Kota	Jl. Ring Road Kota Madiun	NIHIL
18	Polres Madiun	Jalan Raya Madiun-Surabaya Km. 142-143 Ds. Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun sepanjang 1 km.  Jalan Raya Madiun-Ponorogo Km. 186-187 Ds. Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun sepanjang 3 km	Jalan Raya Madiun-Ponorogo Km. 178 Simp 4 (Pada Saat Libur Lebaran dan Nataru) Pasar Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger.
19	Polres Ngawi	Jalur Ngawi- Mantingan KM 8- 9 Masuk Ds. Kawu Kec. Kedunggalar	NIHIL
20	Polres Magetan	Jalur Plaosan- Cemoro Sewu, Kalijumok Mojosemi  Jalur Kawedanan-Takeran Ds Simbatan	Depan Pasar Sayur Plaosan- Magetan
21	Polres Ponorogo	Jl. Ponorogo trenggalek ds Josari kec Jetis Ponorogo	Pasar Tumpah Jl Soekarno Hatta
22	Polres Pacitan	Jl. S Sirnoboyo	Pasaran Pasar Arjosari dan Pasar Tegalombo
23	Polres Bojonegoro	Jl. Bojonegoro-Babat, Km 11- 12 Turut wilayah Kec. Balen, Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Baureno, Ds. Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 1106 – 1118 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.2754

24	Polres Tuban	Jl. Tuban - Widang km. 27-28 ds/kec. widang	NIHIL
25	Polres Lamongan	Jl. Lamongan- Babat Ds. Surabayan Kec. Sukodadi Lamongan	Pasar Babat Jl. Raya Babat Lamongan
26	Polres Pamekasan	Desa Artodung Kec. Galis Kab. Pamekasan	Pasar Keppo (Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan
27	Polres Bangkalan	Jl. H. Moh Noer akses Suramadu Kab. Bangkalan	Pasar Blega Jl Raya Blega kec Blega Kab Bangkalan
28	Polres Sampang	Jl. Raya Torjun Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang	Pasar Ikan Tanjung Jl. Raya Tanjung Desa Dharma Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang
29	Polres Sumenep	Jalan Raya Nambakor Jalan Raya Lenteng	Pasar Tumpah Bluto (Jl Raya Sumenep Pamekasan) Pasar Tumpah Parenduan(Jl Raya Sumenep Pamekasan)
30	Polres Gresik	Jl. Dr. Wahidin Shd	Jl.Raya Manyar Gresik
31	Polres Sidoarjo	Jalan Raya Desa Bakungtemanggungan Balong Bendo Sidoarjo	Jalan Raya Aloha Sidoarjo Jalan raya Perempatan Gedangan Sidoarjo
32	Polres Mojokerto	JL. Ra Basuni Sooko	Simpang 5 Kenanten
33	Polres Jombang	Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran (Km 67 - Km 69)	Jl. Raya Kayen Kec. Bandarkedungmulyo
34	Polres Pelabuhan Tanjung	JL. Kalianak	JL. Jakarta JL. Kalianak JL. Margomulyo
35	Polres Batu	Jl. Raya Ngantang, Kab. Malang  Jl. Abdul Manan Wijaya, Pujon, Kab. Malang  Jl. Raya Gajah Mada, Temas, Kota Batu	Jl. Ir. Soekarno-Jl. Moh. Hatta  Jl. Moh. Hatta (simpang 4)  Jl. Bukit Berbunga Bumiaji (Simpang 3 Bendo)  Jl. Trunojoyo (Exit Songgoriti  Jl. Panglima Sudirman (Simpang 4 Pesanggrahan  Jl. Suropati (Simpang 3 TMP)

36	Polres Probolinggo Kota	Jl. Raya Pesisir desa Pesisir Kab Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman (Pasar Baru)
37	Polres Blitar Kota	Jalan Raya Jiwut Kec. Nglegok Kabupaten Blitar	Jalan Anggrek depan Pasar Templek Kota Blitar
38	Polres Pasuruan Kota	Jalan Raya Rejoso Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan (KM 70 - 71)	Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan
39	Polres Mojokerto Kota	Jl. Raya Pagerluyung	Jl. Bypass

Sumber : Polda Jatim

## **Hambatan dalam Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap Pelanggar Rambu-rambu di Polda Jatim**

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Polda Jatim menghadapi beberapa kendala, menurut Drs. I Wayan Purwa, M.M., Ajun Komisaris Besar Polisi Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim. Salah satu tantangan utama adalah penolakan pemilik kendaraan terhadap sanksi karena pelanggaran dilakukan oleh peminjam kendaraan, tidak oleh pemiliknya sendiri. Masalah ini diperparah oleh sosialisasi yang belum optimal dan peraturan perundang-undangan yang masih kurang menyeluruh di kalangan pengguna kendaraan bermotor. Kendala lain termasuk keterbatasan infrastruktur, seperti kamera ETLE statis yang belum memadai, jaringan VPN yang terbatas, dan biaya investasi yang tinggi untuk peralatan, yang belum terjangkau secara luas di seluruh jajaran Polda Jatim.

Untuk mengatasi kendala finansial tersebut, Polda Jatim telah mengambil langkah inovatif dengan mengembangkan ETLE Mobile, yang lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem ETLE Statis. Sistem *mobile* ini memungkinkan pemasangan lebih luas di ruas-ruas jalan yang sebelumnya tidak tercakup oleh kamera statis. Keputusan untuk mengadopsi ETLE Mobile ini diharapkan meningkatkan cakupan pengawasan dan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah yang belum terlayani.

Setiap perubahan kebijakan selalu membawa dampak positif dan negatif, tergantung pada perspektif berbagai pihak yang terpengaruh. Menurut Wahyu Prawesthi (2015), perubahan dalam kebijakan publik, termasuk implementasi teknologi seperti ETLE, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Namun, melalui inovasi dan penyesuaian berkelanjutan, Polda Jatim berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

## Peran Ditlantas Polda Jatim Memberikan Solusi Dalam Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pelanggaran rambu rambu-rambu Dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Penegakan hukum rambu-rambu di Jawa Timur telah mengalami kemajuan signifikan dengan implementasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem ETLE dirancang untuk memperkuat penegakan hukum secara digital dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, dengan menggunakan teknologi canggih untuk merekam pelanggaran secara otomatis. Perubahan legislatif telah memungkinkan pengakuan bukti elektronik dalam proses hukum, memperkuat efektivitas ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Meskipun ETLE telah berhasil dalam banyak aspek, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk masalah penolakan pemilik kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh orang lain saat terjadi pelanggaran. Infrastruktur pendukung seperti kamera ETLE statis dan jaringan VPN masih terbatas, dan biaya tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi masalah biaya, Polda Jatim telah memperkenalkan ETLE Mobile yang lebih ekonomis dan fleksibel, yang dapat dipasang di ruas jalan yang belum terjangkau oleh sistem statis.

Sistem ETLE tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap rambu-rambu tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan mengurangi interaksi langsung antara polisi dan masyarakat yang sering kali menyulut konflik, ETLE membantu meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Sistem ini telah terbukti efektif dalam menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan, yang secara tidak langsung meningkatkan keselamatan umum.

Ke depannya, pengembangan dan ekspansi ETLE diharapkan tidak hanya terbatas pada peningkatan cakupan geografis tetapi juga inklusi jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi dan diproses. Keterlibatan dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai badan pemerintah dan peningkatan fasilitas pendukung akan memperkuat dasar hukum dan operasional dari ETLE, menjadikannya alat yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan efektivitas dalam mengurangi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, mengurangi konflik antara polisi dan masyarakat, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan cakupan kamera ETLE Statis,

konektivitas jaringan yang masih terbatas, serta biaya tinggi yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan peralatan. Untuk mengatasi ini, disarankan agar Kepolisian Jawa Timur mengimplementasikan ETLE Mobile yang lebih ekonomis dan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah lokal. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penggunaan media seperti *videotron* dan baliho di titik strategis untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sistem ETLE dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat kepatuhan hukum tetapi juga secara proaktif membentuk budaya disiplin berlalu lintas yang lebih baik di Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asmara dkk. (2019). *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13 (1).
- Dellyana, Shant. (2001). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group.
- Djajoesman, H.S. (2001). *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bogor: Prenada Media Group.
- Ilham, Bisri. (2002). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Karjadi, M. (2005). *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*. Bogor: Politiea.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soponyono. (2013). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

# **VISA: Journal of Visions and Ideas**

Vol 4 No 3 (2024) 1106 – 1118 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.2754

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Widowaty, Yeni. (2015). *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: Prosiding.

Wulandari, Ambar Suci. (2020). *Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia*. Jurnal Al-Masbut Volume, 12 (1)

Yuanda, Ayu Christina Wati., Dewily, Ratih Dara Ayu., Dijunmansaputra, Pralisty. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Jurnal Adalah*. Volume 4 (3).